

EKSPLORASI PENGALAMAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PUBLIK

Dwi Santi Wulandari^{1*}, Dwi Cahyono¹, Amalina Maryam Z¹

¹Universitas Muhammadiyah Jember

pupel.dwi79@gmail.com*, dwicahyono@unmuhjember.ac.id, amalinalaryam@unmuhjember.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan akuntabilitas publik di Kabupaten Jember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode *Grounded Theory*, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman pengguna Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan akuntabilitas publik. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi melalui informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD berperan penting dalam tata kelola keuangan daerah, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan teknis, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya kompetensi sumber daya manusia. Dari temuan ini dikembangkan "*Theory of Public Accountability Effectiveness*" yang menekankan pentingnya sinergi antara teknologi, kesiapan SDM, dan dukungan kebijakan untuk memastikan implementasi SIPD yang efektif dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di daerah.

Kata kunci: Akuntabilitas Publik ; *Grounded Theory* ; Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

ABSTRACT

This research aims to explore the implementation of the Local Government Information System (SIPD) in improving public accountability in Jember Regency. The method used in this research is qualitative research with the Grounded Theory method, which aims to deeply understand the user experience of the Local Government Information System (SIPD) in improving public accountability. Data obtained from interviews and documentation through informants. The results showed that SIPD plays an important role in local financial governance, but its implementation still faces technical challenges, limited infrastructure, and lack of human resource competence. From these findings, a 'Theory of Public Accountability Effectiveness' was developed that emphasises the importance of synergy between technology, human resource readiness, and policy support to ensure effective SIPD implementation in realising public transparency and accountability. This research provides theoretical and practical contributions in strengthening e-governance in the regions.

Keywords: *Grounded Theory ; Public Accountability ; System of Regional Government Information (SIPD)*

PENDAHULUAN

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sistem berbasis informasi yang digunakan untuk mengelola data dan informasi dalam pemerintahan daerah, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan, pelaporan anggaran, dan administrasi publik. SIPD bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, dan memberikan kemudahan dalam akses informasi kepada masyarakat. (Wahyudi et al., 2024). SIPD berperan penting dalam mendukung good governance, memastikan bahwa proses pemerintahan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Sistem ini dirancang untuk menyelaraskan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, memastikan keterpaduan dalam pelaksanaan program pembangunan dan transparansi dalam penggunaan dana. (Putriani & Fanida, 2022).

Implementasi SIPD membawa dampak positif dalam mempercepat proses perencanaan dan penganggaran, sekaligus meningkatkan akurasi dan kredibilitas laporan keuangan pemerintah

daerah. Penggunaan SIPD memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan dan transparansi publik. (Prasetyo et al., 2023). SIPD memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan dan transparansi publik. Dengan penerapan sistem ini, diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi yang lebih terbuka dan akurat mengenai penggunaan dana, mendorong peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan yang disusun untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan strategis yang telah ditetapkan. (Setyawan, 2020). Berdasarkan data dari Biro Organisasi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Jember berada pada peringkat yang relatif rendah diantara Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Pada data yang tersedia, Kabupaten Jember mendapatkan predikat "B" dengan nilai yang bervariasi di tahun yang berbeda.

Tabel 1 Hasil Penilaian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Selama Tahun 2019-2024

Tahun	Angka	Predikat	Penggunaan Aplikasi
2019	60,75	B	SIMDA
2020	61,60	B	SIMDA
2021	62,06	B	SIPD
2022	63,15	B	SIPD
2023	62,14	B	SIPD
2024	63,70	B	SIPD

Sumber: Data Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur

Tabel 1 menunjukkan fluktuasi penilaian laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember selama tahun 2019-2024, yang disandingkan dengan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pada tahun 2019-2020 implementasi penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dapat memerikan kenaikan penilaian laporan kinerja Instansi pemerintah daerah dari 60,75 menjadi 61,60 pada tahun 2019 ke tahun 2020. Pada tahun 2021, penilaian laporan kinerja meningkat sedikit sebesar 1% dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang sebesar 2%. Namun, penurunan sebesar 2% terjadi pada tahun 2023, diikuti oleh peningkatan sebesar 3% pada tahun 2024. Fenomena ini menunjukkan adanya variabilitas yang dalam penerapan implementasi sistem pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun, mengindikasikan bahwa ada faktor-faktor yang tidak terduga atau tidak terkelola dengan baik yang mempengaruhi penggunaan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

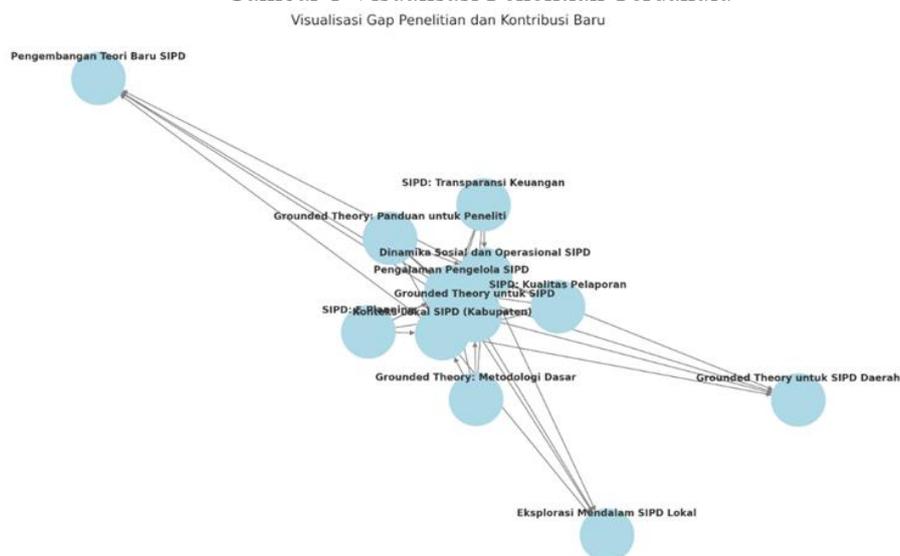
Di Kabupaten Jember, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diharapkan dapat menjadi alat strategis untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyusun program-program pembangunan yang lebih terarah dan akuntabel. Namun, karena kompleksitas pengelolaan SIPD yang melibatkan banyak aktor dan proses, dibutuhkan pendekatan eksplorasi berbasis data lapangan untuk memahami bagaimana pengelolaannya dapat berkontribusi terhadap akuntabilitas publik. Oleh karena itu, pendekatan Grounded Theory menjadi relevan untuk menggali pengalaman langsung pengguna SIPD dan mengembangkan teori baru yang menjelaskan dinamika implementasi sistem ini secara lebih mendalam.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan di pemerintahan daerah. Penerapan SIPD dan sistem terkait, seperti Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan Daerah (SIAKD), terbukti meningkatkan efisiensi dan akurasi laporan keuangan daerah (Gustini et al., 2024). Selain itu, SIPD mendukung e-planning untuk perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, meskipun keterbatasan jaringan dan kapasitas pengguna menjadi kendala signifikan (Putriani & Fanida, 2022). Evaluasi efektivitas SIPD juga telah

dilakukan dengan pendekatan teori DeLone dan McLean untuk mengukur dampak terhadap kualitas laporan keuangan (Wahyudi et al., 2024). Dalam konteks arsip pemerintahan, SIPD menjadi bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mendukung transparansi administratif (Khadija et al., 2024). Selain itu, implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menunjukkan bahwa integrasi sistem informasi membantu peningkatan akuntabilitas dan efisiensi pelaporan keuangan daerah (Diana et al., 2019). Pada masa pandemi, SIPD juga menjadi elemen penting dalam mendukung kelangsungan pelayanan publik secara daring dan mempercepat proses administrasi (Salsabila et al., 2023).

Penelitian terdahulu mengenai Grounded Theory juga memunculkan hal yang menarik. Pendekatan Grounded Theory menjadi metodologi penting dalam penelitian sosial untuk mengembangkan teori berbasis data empiris. Penelitian sebelumnya telah membahas langkah-langkah metodologi ini, seperti pengumpulan data yang sistematis melalui observasi mendalam dan wawancara, yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam (Lianto, 2019). Grounded Theory juga memberikan panduan bagi peneliti pemula untuk memahami iterasi data, analisis perbandingan konstan, dan pengkodean data yang fleksibel (Tie et al., 2019). Prinsip-prinsip utama Grounded Theory, seperti pengumpulan data iteratif dan fleksibilitas analisis, dijelaskan secara terperinci untuk membantu peneliti mencapai pemahaman konseptual yang mendalam (Eppich et al., 2019). Dalam penelitian lain, ciri khas studi Grounded Theory, termasuk pentingnya tinjauan literatur dalam pendekatan ini, diidentifikasi untuk memaksimalkan hasil penelitian (Turner & Astin, 2021).

Gambar 1 Visualisasi Penelitian Terdahulu



Gambar 1 menunjukkan visualisasi penelitian terdahulu terkait Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Grounded Theory serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang masih perlu dieksplorasi lebih lanjut. Visualisasi ini mencerminkan bahwa penelitian terdahulu telah banyak membahas aspek transparansi keuangan, kualitas laporan, dan implementasi e-planning dalam SIPD, serta prinsip dasar dan metodologi pengkodean dalam Grounded Theory. Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan, terutama dalam memahami pengalaman pengelola SIPD, dinamika sosial dan operasional dalam implementasinya, serta penggunaan pendekatan Grounded Theory dalam mengembangkan teori baru terkait sistem ini. Khususnya dalam konteks daerah seperti Kabupaten Jember, penelitian mengenai penerapan SIPD masih terbatas, meskipun kebijakan dan infrastruktur tiap daerah berbeda dan memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengeksplorasi lebih dalam implementasi SIPD dalam skala lokal, menggunakan pendekatan Grounded Theory untuk memahami fenomena ini secara induktif berdasarkan pengalaman langsung pengelola, serta mengembangkan teori baru yang dapat berkontribusi pada perbaikan sistem dan kebijakan pemerintahan daerah agar lebih akuntabel dan transparan.

Berdasarkan fenomena ini, pendekatan Grounded Theory digunakan untuk menggali lebih dalam pengalaman para pengelola SIPD di Kabupaten Jember. Pendekatan ini relevan dikarenakan memungkinkan pengembangan teori baru yang didasarkan pada data empiris dari lapangan. Dengan memahami berbagai tantangan dan keberhasilan implementasi SIPD secara langsung dari perspektif pengguna, Grounded Theory dapat menghasilkan konsep-konsep inti yang menjelaskan bagaimana SIPD berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas publik serta memberikan rekomendasi strategis untuk pengelolaan sistem di masa depan.

Dengan mempertimbangkan kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi dalam memahami implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui pendekatan *Grounded Theory*. Melalui eksplorasi mendalam terhadap pengalaman pengelola SIPD di Kabupaten Jember, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan teori baru yang tidak hanya menjelaskan dinamika sosial dan operasional dalam penerapan sistem ini, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Grounded Theory, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman pengguna Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan akuntabilitas publik. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam dan mengembangkan teori baru berdasarkan data empiris. Sumberdata yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, (Rifai, 2019). Subjek penelitian terdiri dari pengelola SIPD, pejabat pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas sistem ini, serta pemangku kepentingan lain yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam implementasi SIPD. Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan theoretical sampling yaitu memilih partisipan berdasarkan relevansi data, dimana Metode ini bertujuan untuk mengembangkan teori berdasarkan data yang dikumpulkan. (Farida et al., 2021) berdasarkan relevansi data yang ditemukan dalam proses penelitian. Selanjutnya proses koding Grounded Theory (GT) sebagai Teknik Analisi data dalam penelitian ini, pertama Open Coding; Pada tahap ini, data yang terkumpul, baik dari wawancara maupun observasi, dibaca dengan seksama untuk mengidentifikasi segmen-segmen data yang relevan. Setiap segmen data diberikan kode untuk menggambarkan makna yang terkandung dalamnya. Kode ini merujuk pada konsep atau kategori yang muncul dari data. Kedua Axial Coding: Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan kode-kode yang serupa untuk membentuk kategori yang lebih besar. Proses ini bertujuan untuk menghubungkan konsep-konsep dan tema-tema yang muncul, serta mencari hubungan antara kategori-kategori tersebut. Ketiga Selective Coding: Pada tahap terakhir ini, peneliti mengidentifikasi kategori inti yang menghubungkan seluruh data dan tema yang telah dianalisis. Kategori inti ini akan digunakan untuk mengintegrasikan kategori-kategori seperti "Peran SIPD dalam Tata Kelola Keuangan Daerah,".

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Analisis Data dengan Grounded Theory

Open coding

Tujuan utama dari open coding adalah untuk membuka dan mengeksplorasi data secara menyeluruh, tanpa terikat oleh kerangka teori yang sudah ada, sehingga memungkinkan peneliti untuk menemukan tema-tema yang signifikan dan relevan dengan fenomena yang diteliti.

Tabel 2 Hasil Open Coding

Res-ponden	Unit Data	Kode
------------	-----------	------

1	SIPD merupakan sistem aplikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Yang bertujuan untuk menyatukan data baik dari perencanaan, keuangan, sampai dengan pelaporan daerah seluruh Indonesia.	2	SIPD merupakan penyelenggaraan keuangan daerah, dengan tujuan SIPD adalah penyatuan data nasional
3	SIPD adalah Sistem pengelolaan keuangan terintegrasi, Tujuan utama SIPD untuk pengelolaan keuangan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, Tujuan SIPD untuk Transparansi dan akuntabilitas, Tujuan SIPD: Efisiensi anggaran	4	SIPD untuk pengelolaan dan integrasi data pemerintahan daerah, Tujuan SIPD untuk efisiensi pengalokasian anggaran pemerintah daerah
4	SIPD dirancang untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan berbagai proses pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan dan evaluasi. Diharapkan SIPD dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengambilan keputusan serta mengurangi potensi kesalahan.	4	a.Memahami SIPD dari modul/buku yang di keluarkan oleh Kemendagri b.Tujuan utamanya untuk mempermudah pekerjaan

	yang akuntabel, transparansi dan kemudahan akses pihak lain	
5	Untuk mempermudah dalam melakukan proses Keuangan dari perencanaan hingga pelaporan	SIPD adalah aplikasi untuk mengelola dan mengintegrasikan data, Tujuan SIPD untuk berbagi data dan informasi
6	Menjadikan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan menjadi mudah terpusat menjadi satu data.	Tujuan SIPD adalah integrasi proses keuangan
7	Pemerintah Daerah dapat melakukan efisiensi terhadap perencanaan, penganggaran serta pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan. Sejak 2021 Pemerintah Kab. Jember memakai SIPD. Yang kami rasakan setelah memakai SIPD adalah efisiensi waktu, biaya dan tepat sasaran dalam penyusunan perencanaan anggaran, meskipun kadang masih bnyak kendala dalam sistem tersebut.	Tujuan SIPD adaah untuk efisiensi pengalokasian anggaran pemerintah daerah, Perubahan setelah SIPD adalah data dan informasi terintegrasi dan transparan

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)\

Analisis dari Tabel 2 mengungkapkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tidaklah tanpa tantangan. Beberapa responden menyoroti kebutuhan akan perbaikan dan aplikasi pendamping, mengindikasikan bahwa SIPD mungkin belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan operasional yang ada. Fitur SIPD yang tidak lengkap juga menjadi isu penting, yang memaksa pengguna untuk mencari solusi manual atau aplikasi tambahan. Selain itu, kebutuhan infrastruktur yang memadai dan kendala sistem seperti error dan maintenance sering menjadi hambatan dalam penggunaan SIPD.

Tantangan lainnya berkaitan dengan sumber daya manusia dan kesiapan operasional. Kurangnya keterampilan teknis pegawai dan kesiapan infrastruktur SIPD yang belum optimal menjadi perhatian utama. Akses SIPD yang terbatas untuk masyarakat juga menjadi isu terkait transparansi. Terakhir, lambatnya respon helpdesk dalam menanggapi masalah yang dihadapi pengguna SIPD dapat menghambat penyelesaian pekerjaan. Tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya perhatian lebih lanjut terhadap aspek-aspek teknis, sumber daya manusia, dan dukungan sistem untuk memastikan implementasi SIPD yang efektif dan efisien.

Axial Coding

Axial coding merupakan tahap lanjutan dalam analisis data kualitatif dengan pendekatan Grounded Theory, yang bertujuan untuk mengembangkan kategori-kategori yang lebih abstrak dan komprehensif dari kode-kode yang telah diidentifikasi pada tahap open coding. Proses ini melibatkan pengaitan antar kode, pengelompokan kode-kode tersebut ke dalam kategori-kategori yang lebih luas, dan identifikasi dimensi-dimensi dari setiap kategori. Axial coding membantu peneliti untuk memahami hubungan yang kompleks antara berbagai konsep yang muncul dari data, serta untuk membangun kerangka konseptual yang lebih terstruktur.

Axial coding akan digunakan untuk mengelompokkan kode-kode yang berkaitan dengan pengalaman pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan akuntabilitas publik. Kode-kode yang telah diidentifikasi pada tahap *open coding*, seperti "SIPD sebagai alat pengelolaan keuangan," "tantangan implementasi SIPD," dan "dampak SIPD terhadap akuntabilitas," akan dikaitkan dan dikembangkan menjadi kategori-kategori seperti "Peran SIPD dalam Tata Kelola Keuangan Daerah," "Tantangan Implementasi SIPD," dan "Dampak SIPD terhadap Akuntabilitas Publik." Kategori-kategori ini akan menjadi dasar untuk pengembangan teori substantif mengenai fenomena yang diteliti.

Tabel 3 Axial Coding

Kategori	Kode yang Terkait	Deskripsi
Peran SIPD dalam Tata Kelola Keuangan Daerah	SIPD: Penyelenggaraan keuangan daerah, SIPD: Sistem pengelolaan keuangan terintegrasi, SIPD: Aplikasi pengelolaan dan integrasi data	SIPD berfungsi sebagai alat utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, mulai dari perencanaan hingga pelaporan keuangan.
Tantangan Implementasi SIPD	Tantangan: Kendala sistem SIPD, Fitur SIPD: Tidak lengkap, Infrastruktur tidak memadai, Error dan maintenance, Kurangnya keterampilan teknis pegawai, Akses terbatas	Implementasi SIPD dihadapkan pada berbagai tantangan teknis, seperti sistem yang sering bermasalah, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya keterampilan teknis pegawai.
Dampak SIPD terhadap Akuntabilitas Publik	SIPD: Transparansi dan akuntabilitas, SIPD: Laporan keuangan akuntabel, SIPD: Pengelolaan keuangan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	SIPD memiliki dampak positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah.
Efisiensi Pengelolaan Keuangan	SIPD: Integrasi proses keuangan, SIPD: Efisiensi pengalokasian anggaran pemerintah daerah, SIPD: Berbagi data dan informasi	SIPD membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam hal pengalokasian anggaran dan berbagi data antar instansi pemerintah.
Koordinasi dan Kolaborasi Antar Instansi	SIPD: Berbagi data dan informasi antar instansi, Memudahkan koordinasi dan kolaborasi	SIPD mendukung koordinasi dan kolaborasi antar instansi pemerintah daerah untuk pelaksanaan program pembangunan yang lebih efektif.

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

Tabel *axial coding* yang disajikan di atas menggambarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berdasarkan pengalaman responden dalam mengelola pengelolaan keuangan daerah. Tabel ini memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara berbagai konsep yang muncul dari proses open coding, dan mengelompokkan kode-kode tersebut ke dalam kategori-kategori yang lebih abstrak untuk memahami fenomena tersebut secara lebih komprehensif.

SIPD memegang peran penting dalam tata kelola keuangan daerah, sebagaimana tercermin dalam kategori pertama, "Peran SIPD dalam Tata Kelola Keuangan Daerah." Sistem ini berfungsi sebagai alat pengelolaan keuangan yang mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan. SIPD bukan hanya sekadar aplikasi untuk mencatat data, tetapi juga menjadi penghubung yang menyatukan berbagai proses administratif dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan tujuan untuk menyatukan data perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan, SIPD membantu menciptakan keselarasan dan integrasi data antara instansi yang berbeda, sehingga mempermudah pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Pada akhirnya, hal ini berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah yang lebih terstruktur.

SIPD membawa berbagai manfaat, yang tidak tanpa tantangan. Tanpa keterampilan teknis, keberbatasan sumber daya manusia, dan infrastruktur yang belum memadai, SIPD membantu meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas sistem. Selain itu, akses untuk masyarakat terhadap data yang dikelola oleh SIPD juga melibatkan aspek sumber daya manusia yang memerlukan pelatihan dan pengembangan lebih lanjut.

Kategori "Dampak SIPD terhadap Akuntabilitas Publik" menunjukkan bahwa SIPD memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui integrasi data yang disediakan oleh SIPD, pemerintah daerah dapat lebih transparan dalam menyajikan laporan keuangan kepada publik. Kategori "Efisiensi Pengelolaan Keuangan" menggambarkan bagaimana SIPD membantu dalam meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. SIPD memungkinkan proses pengelolaan keuangan menjadi lebih terintegrasi dan mudah diakses. Kategori "Koordinasi dan Kolaborasi Antar Instansi" menunjukkan peran SIPD dalam memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah daerah. Secara keseluruhan, analisis axial coding ini memberikan gambaran yang lebih holistik tentang SIPD sebagai sistem yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan daerah. Sindhakan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, SIPD masih dihadapkan pada tantangan teknis, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang memadai.

Selective Coding

Selective coding adalah tahap akhir dalam proses analisis data Grounded Theory, yang berfokus pada integrasi dan penyempurnaan kategori-kategori yang telah dikembangkan pada tahap axial coding

Tabel 4 *Selective Coding*

Kategori Inti	Kategori Terkait	Deskripsi
Peningkatan	Peran SIPD dalam	SIPD berfungsi sebagai alat pengelolaan

Kategori Inti	Kategori Terkait	Deskripsi
Akuntabilitas Publik melalui Implementasi SIPD	Tata Kelola Keuangan Daerah	keuangan yang menyatukan berbagai proses keuangan daerah, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
	Tantangan Implementasi SIPD	Kendala teknis, keterbatasan infrastruktur, dan sumber daya manusia yang tidak memadai dapat menghambat implementasi yang optimal dari SIPD.
	Dampak terhadap Akuntabilitas Publik SIPD	SIPD berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, memudahkan evaluasi publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efisien dan Transparan	Peran SIPD dalam Tata Kelola Keuangan Daerah	SIPD membantu pengelolaan dan integrasi data keuangan daerah yang lebih transparan dan efisien, menciptakan keterbukaan dan kolaborasi antar instansi.
	Efisiensi Pengelolaan Keuangan	SIPD mempermudah proses pengelolaan anggaran dan pengalokasian dana dengan sistem yang terintegrasi, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan.
Tantangan Implementasi SIPD dalam Infrastruktur dan SDM	Tantangan Implementasi SIPD	Masalah teknis dan infrastruktur yang belum memadai serta keterbatasan keterampilan teknis pegawai menjadi tantangan dalam mengoptimalkan penggunaan SIPD.
	Dampak terhadap Akuntabilitas Publik SIPD	Transparansi yang dihasilkan dari SIPD sering terganggu oleh kendala-kendala teknis yang memperlambat implementasi sistem secara menyeluruh.
Koordinasi dan Kolaborasi Antar Instansi Pemerintah	Koordinasi dan Kolaborasi Antar Instansi	SIPD memfasilitasi koordinasi antar instansi pemerintah, meningkatkan komunikasi dalam pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah.
	Peran SIPD dalam Tata Kelola Keuangan Daerah	SIPD meningkatkan kolaborasi dan berbagi data antar instansi dalam pengelolaan keuangan, yang berkontribusi pada tata kelola yang lebih baik.

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

Pada tabel 4 *Selective Coding* menggambarkan pengintegrasian kategori-kategori yang telah dikembangkan pada tahap Axial Coding untuk membangun teori substantif yang menjelaskan fenomena implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Kategori inti yang ditemukan dalam Selective Coding adalah "Peningkatan Akuntabilitas Publik melalui Implementasi SIPD," yang menjadi tema sentral dalam menjelaskan bagaimana SIPD memberikan kontribusi terhadap pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. SIPD tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyatukan data keuangan yang tersebar di berbagai instansi, tetapi juga memainkan peran penting dalam memperbaiki transparansi dan akuntabilitas public.

Selain itu, Selective Coding mengungkapkan bahwa tantangan implementasi SIPD merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan sistem ini dalam mencapai tujuannya. Pada kategori "Tantangan Implementasi SIPD," berbagai kendala teknis, seperti kegagalan sistem, infrastruktur yang tidak memadai, dan ketergantungan pada teknologi yang sering mengalami gangguan, menjadi masalah yang signifikan dalam proses implementasi SIPD. Pengguna sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses atau menggunakan SIPD karena adanya kesalahan sistem (error) atau masa pemeliharaan (maintenance) yang memperlambat proses administrasi dan pengelolaan keuangan. Kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya keterampilan teknis di kalangan pegawai yang terlibat dalam pengoperasian SIPD, yang memperburuk keterlambatan dan ketidakakuratan dalam pengelolaan data keuangan. Keterbatasan infrastruktur dan kompetensi teknis ini mengindikasikan bahwa SIPD, meskipun menjanjikan potensi besar dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, memerlukan perhatian lebih dalam hal pelatihan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan dukungan infrastruktur untuk menjamin efektivitas implementasinya.

Secara keseluruhan, Selective Coding menunjukkan bahwa implementasi SIPD memiliki potensi yang besar untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah, namun tantangan terkait teknis, infrastruktur, SDM, dan aksesibilitas masih perlu diperbaiki. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, SIPD dapat secara efektif meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah. Proses ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi SIPD, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang akan meningkatkan keberhasilan sistem ini di masa depan.

B. PEMBAHASAN

Pendekatan Grounded Theory dalam Mengembangkan Teori Baru Terkait Pengelolaan SIPD di Tingkat Daerah

Pendekatan Grounded Theory berperan penting dalam mengembangkan teori baru terkait pengelolaan SIPD, karena pendekatan ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data secara induktif yang memungkinkan teori tersebut berkembang berdasarkan realitas lapangan. Salah satu hasil signifikan dari penelitian ini adalah ditemukannya faktor-faktor kunci yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi SIPD, yaitu infrastruktur teknologi yang memadai, pelatihan yang berkelanjutan bagi pegawai, dan komitmen politik yang kuat dari pemerintah daerah. Teori baru ini menekankan bahwa untuk mewujudkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, tidak hanya diperlukan perangkat teknologi yang baik, tetapi juga sumber daya manusia yang terampil dan dukungan kebijakan yang jelas dari pemerintah pusat.

Melalui Grounded Theory, penelitian ini juga mengidentifikasi dinamika sosial yang terlibat dalam implementasi SIPD, termasuk resistensi terhadap perubahan yang sering kali muncul di kalangan pegawai yang telah terbiasa dengan sistem lama. Pengelolaan perubahan yang efektif menjadi sangat penting untuk mengurangi resistensi ini dan memastikan bahwa pegawai memahami manfaat dari SIPD. Salah satu responden mengungkapkan, "*Kami sering merasa kesulitan beradaptasi dengan sistem baru, tetapi setelah diberikan pelatihan lebih intensif dan kami mulai merasakan manfaatnya, kami lebih mudah menerima perubahan.*" Hal ini menunjukkan bahwa manajemen perubahan yang efektif, termasuk pelatihan yang berkelanjutan dan komunikasi yang jelas mengenai manfaat SIPD, sangat penting untuk keberhasilan implementasi sistem ini di tingkat daerah.

Theory of good governance, konsep-konsep seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik memainkan peran penting dalam memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan (Addink, 2019). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa SIPD dapat mendukung prinsip-prinsip good governance, namun untuk mencapai hasil yang optimal, perlu ada perbaikan dalam infrastruktur teknologi, pelatihan berkelanjutan, dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan menggunakan Grounded Theory, penelitian ini berhasil mengidentifikasi hubungan antara faktor-faktor ini dan bagaimana mereka berkontribusi pada pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel di tingkat daerah.

Teori baru yang dihasilkan dari penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi SIPD di Kabupaten Jember bergantung pada tiga faktor utama: pertama, kesiapan infrastruktur teknologi, kedua, kompetensi sumber daya manusia, dan ketiga, dukungan kebijakan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Temuan ini relevan dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kesuksesan sistem informasi dalam pemerintahan sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor ini (Rahmadhan & Handayani, 2023; Zeebaree & Aqel, 2021). Dengan demikian, teori baru yang dikembangkan dalam penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih holistik tentang bagaimana SIPD dapat berfungsi secara optimal dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik di pemerintahan daerah.

Pengembangan Teori dalam Implementasi SIPD di Pemerintahan Daerah

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Melalui pendekatan Grounded Theory, penelitian ini berhasil mengidentifikasi faktor-faktor utama yang berpengaruh dalam penerapan SIPD serta tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas publik. Berdasarkan temuan dari tiga tahap analisis, yaitu open coding, axial coding, dan selective coding, penelitian ini menawarkan teori baru yang disebut "Theory of Public Accountability Effectiveness" (Teori Efektivitas Akuntabilitas Publik).

Mengapa "Theory of Public Accountability Effectiveness" diperlukan? Teori ini muncul sebagai jawaban atas tantangan yang dihadapi dalam implementasi SIPD dan bagaimana sistem ini seharusnya dirancang agar benar-benar mampu meningkatkan akuntabilitas publik. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kesenjangan antara tujuan utama SIPD, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dengan realitas implementasi di lapangan.

Banyak daerah, termasuk Kabupaten Jember, mengalami hambatan teknis dan operasional, yang menyebabkan SIPD belum mampu sepenuhnya mewujudkan akuntabilitas publik yang optimal. Beberapa responden menyebutkan bahwa meskipun SIPD telah diterapkan, masih ada ketidaksempurnaan dalam sistem, ketidakkonsistenan dalam penggunaan, serta kurangnya kesiapan SDM dalam mengelola dan mengoptimalkan fitur-fitur SIPD. Salah satu responden menyatakan:

"Kami memahami bahwa tujuan utama SIPD adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi dalam praktiknya, masih banyak kendala yang membuat sistem ini belum sepenuhnya efektif. Kurangnya pelatihan dan infrastruktur teknologi yang terbatas sering kali menjadi hambatan utama."

Selain itu, ada tantangan dalam aspek regulasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, di mana kebijakan yang mendukung penggunaan SIPD belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa efektivitas akuntabilitas publik melalui sistem informasi seperti SIPD tidak hanya bergantung pada sistem itu sendiri, tetapi juga pada lingkungan dan ekosistem yang mendukung penerapannya.

Dari perspektif teoretis, teori ini dibangun di atas dasar konsep good governance (Addink, 2019) yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta efisiensi dalam administrasi pemerintahan. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan good governance melalui SIPD tidak bisa hanya mengandalkan sistem teknologi, melainkan harus didukung oleh tiga faktor utama yang menjadi indikator dalam teori baru ini.

Bagaimana "*Theory of Public Accountability Effectiveness*" Bekerja? *Theory of Public Accountability Effectiveness* berfungsi sebagai kerangka kerja konseptual yang menjelaskan bagaimana efektivitas akuntabilitas publik dapat diwujudkan melalui penggunaan sistem informasi di pemerintahan daerah.

Penelitian ini membuka peluang untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai implementasi SIPD dan bagaimana teori Public Accountability Effectiveness dapat diadaptasi di berbagai konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Salah satu arah penelitian yang dapat dilaksanakan adalah penerapan teori ini pada daerah-daerah lain dengan kondisi dan tantangan yang berbeda. Penelitian lebih lanjut dapat menguji apakah tiga faktor utama yang ditemukan dalam teori ini—yaitu teknologi dan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, dan dukungan kebijakan—memiliki dampak yang sama dalam konteks daerah dengan keterbatasan infrastruktur yang lebih besar atau kekurangan pelatihan di tingkat pemerintah daerah. Penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang sama, yaitu Grounded Theory, untuk mengumpulkan data dari berbagai daerah, baik di kota besar maupun di daerah terpencil, guna menguji apakah teori yang dikembangkan di Kabupaten Jember dapat diterapkan secara lebih luas. Hal ini tidak hanya akan memperkaya pemahaman kita tentang implementasi SIPD tetapi juga akan memperluas penerapan teori ini dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia secara lebih umum.

KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini bahwa implementasi SIPD di Kabupaten Jember telah memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Namun, penerapan sistem ini belum sepenuhnya optimal akibat adanya kendala teknis, keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya keterampilan teknis pengguna. Melalui pendekatan Grounded Theory, penelitian ini berhasil mengembangkan teori baru yaitu Theory of Public Accountability Effectiveness, yang menyatakan bahwa efektivitas akuntabilitas publik melalui SIPD sangat bergantung pada kesiapan teknologi, kompetensi SDM, dan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah. Keberhasilan implementasi SIPD memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek teknologinya, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial dan operasional di lingkungan pemerintahan daerah. Penelitian ini juga membuka peluang bagi penelitian lanjutan di daerah lain guna menguji penerapan teori ini secara lebih luas dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, P., Eforis, C., & Osesoga, M. S. (2019). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan. *ULTIMA Accounting*. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v10i2.928>
- Eppich, W., Olmos-Vega, F. M., & Watling, C. (2019). Grounded Theory Methodology: Key Principles. *Healthcare Simulation Research*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-26837-4_18

- Gustini, G., Azuwandri, A., Putra, M. B. E., & Novrianda, H. (2024). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan Daerah (SIAKD) dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Administrasi Bisnis Nusantara*. <https://doi.org/10.56135/jabnus.v3i2.167>
- Khadija, M. A., Jayanti, I. S. D., Kartikasari, H., & Nimah, F. U. (2024). Bimbingan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Bidang Kearsipan: Tinjauan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v6i1.9812>
- Lianto, F. (2019). Grounded Theory Methodology in Architectural Research. *Journal of Physics: Conference Series*, 1179. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1179/1/012102>
- Prasetyo, B., Toha, L. Q., & YuliaRetnani, W. E. (2023). Risk Management using COBIT 5 for Risk: A Case Study on Local Government in Indonesia. *Kinetik: Game Technology, Information System, Computer Network, Computing, Electronics, and Control*. <https://doi.org/10.22219/kinetik.v8i1.1585>
- Putriani, F., & Fanida, E. (2022). EFEKTIVITAS SISTEM E-PLANNING DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG). *Publika*. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p1257-1268>
- Salsabila, H., Ninghardjanti, P., & Susilowati, T. (2023). Implementasi e-government di masa pandemi dalam pelayanan publik oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sragen. *JIKAP (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*. <https://doi.org/10.20961/jikap.v7i5.47081>
- Setyawan, W. (2020). PENGARUH PENERAPAN E-BUDGETING DAN SISTEMPENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS PELAPORANKEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA. <https://consensus.app/papers/pengaruh-penerapan-ebudgeting-dan-sistempengendalian-setyawan/0e44b6e07fe454e5820b400e9cdc4a60/>
- Tie, Y. C., Birks, M., & Francis, K. (2019). Grounded theory research: A design framework for novice researchers. *SAGE Open Medicine*, 7. <https://doi.org/10.1177/2050312118822927>
- Turner, C., & Astin, F. (2021). Grounded theory: What makes a grounded theory study? *European Journal of Cardiovascular Nursing : Journal of the Working Group on Cardiovascular Nursing of the European Society of Cardiology*. <https://doi.org/10.1093/eurjcn/zvaa034>
- Wahyudi, K. P., Johannes, A. W., Sinurat, M., & Romarina, A. (2024). Optimalisasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Gianyar. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*. <https://doi.org/10.33701/jekp.v11i1.4381>